

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Haris Yuda Prawira

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20 Sumedang 45363 Jawa Barat
Email: harisyudaprawira@gmail.com

ABSTRAK

Fokus dalam penulisan laporan akhir ini adalah tentang pelaksanaan kebijakanketerbukaan dokumen kontrak dalam bentuk aplikasi website yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, membahas faktor penghambat dan pendorong serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Person, place, paper*. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi melalui triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian magang ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal. Kurang optimalnya pelaksanaan sistem ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya koordinasi yang ada di pemerintahan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada untuk pengoprasian dan perawatan Website, sosialisasi yang dirasa masih kurang dari pemerintah yang menimbulkan sikap acuh dari masyarakat. Penulis menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem ODC (*Open Data Contract*) dengan memperhatikan aspek yang berpengaruh dalam pelaksanaan program seperti komunikasi, sumber daya, sikap aparatur dan struktur birokrasi. selain itu perlu keseriusan dan penekanan yang lebih dari pemerintah agar program ini memberikan hasil yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : implementasi, keterbukaan dokumen kontrak, sistem aplikasi, website

ABSTRACT.

The focus of this final report is the implementation of Open Data Contract policy in the form of a website application at the Communication and Informatics Office of Bojonegoro Regency, discussing the inhibiting and driving factors and the efforts made by the government in overcoming the problem. The research method used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The technique collecting data used is Person, place, paper. In addition, the technique of data collection is done by interviewing, observing, and analyzing documents. While the data analysis technique is done by reducing data, presenting data and verification through triangulation of data collection techniques. The results the implementation of the Open Data Contract System in the Bojonegoro Regency Communication and Information Agency is still not optimal. The lack of optimal implementation of this system is influenced by several factors including the lack of coordination in the government, lack of existing Human Resources for operation and maintenance of the Website, socialization that is still lacking from the government which creates an indifferent attitude from the community. The author suggests increasing the implementation of the ODC (Open Data Contract) system by paying attention to the influential aspects in the implementation of the program such as communication, resources, attitudes of the apparatus and bureaucratic structures. community life.

Keywords: implementation, open data contract, application systems, websites

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 15 kota/ daerah di dunia yang terpilih sebagai Project Open Government Partnership (OGP) Sub-National Level. Bojonegoro sejajar dengan Paris, Madrid, Skotlandia, Buenos Aires, Jalisco (Meksiko), Sao Paolo. Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro mewakili kota/ kabupaten se-Indonesia, dikarenakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, demokratis, partisipatif dan inovatif yang berbasis ICT (information, communication and technology).

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu pilot project OGP, ada 5 (lima) Rencana Aksi

(Renaksi) yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2016-2017. Salah satu dari Renaksi adalah mewujudkan Open Data Kontrak. Sebuah inisiasi untuk menjadikan transparan semua proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaporan/eval-uasi dan monitoring. Untuk mendukung pelaksanaan Open Dokumen Kontrak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 33 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Guna mengoptimalkan kebijakan Open Dokumen Kontrak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan membuat aplikasi sistem pusat informasi yang dapat memuat se-luruh proses tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah kabupaten Bojonegoro secara holistik melalui pendekatan interoperabilitas data; dimulai perencanaan, penganggaran, lelang, pelaksanaan dan pemantauan dan pelaporan. Pembuatan platform/aplikasi ini dimaksudkan agar publik dapat mendapatkan informasi secara utuh dari seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.

Interoperabilitas data merupakan sistem pendekatan terbaru yang secara teknis dapat memungkinkan pertukaran data atau informasi dari dua atau lebih suatu sistem aplikasi. Interoperabilitas tidak memerlukan penyamaan platform perangkat keras atau perangkat lunak, semisal dengan system operasi tertentu. Interoperabilitas data lebih menekankan standarisasi format pertukaran data.

Pendekatan interoperabilitas data dalam pembuatan aplikasi Open Dokumen Kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara praktis, efisien dan efektif. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki beberapa aplikasi yang berhubungan dengan proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Seperti aplikasi e-musrenbang (Bappeda), e-budgeting (SIMDA-BPKAD), e-procurement (SIRUP dan LPSE) dan e-reporting (SIMPEN-PU). Hanya saja, dari masing-masing aplikasi ini masih berdiri sendiri-sendiri. Belum terintegrasi atau inter-operability.

Adanya banyak aplikasi yang tidak terkoneksi ini menjadikan kerja-kerja birokrasi lebih tidak efektif dan efisien. Diantaranya, harus ada petugas entri untuk masing-masing aplikasi, untuk inputing/ entri data juga dilakukan sendiri-sendiri pada masing-masing aplikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi publik, adanya aplikasi-aplikasi yang berbedabeda-beda dan terpisah-pisah (tidak saling terhubung/interoperability) dari tahapan proses pengadaan barang dan jasa, me-nyebabkan informasi yang didapatkan tidak utuh, berserakan.

Oleh karenanya, Bojonegoro Institute bekerjasama dengan Hivos, telah melaku-kan assessment pada semua aplikasi yang dimiliki pemerintah kabupaten Bojone-goro, khususnya aplikasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengang-garan, pelelangan dan pelaporan. Dengan harapan, dari kegiatan assessment terse-but menghasilkan rekomendasi yang ber-manfaat dalam penyusunan aplikasi Open Dokumen Kontrak yang berbasis OCDS, sehingga dapat dilakukan inter-operabili-tasi aplikasi e-musrenbang, e-budgetting (SIMDA), e-Procurement (SIRUP-LPSE) dengan Aplikasi Open Dokumen Kontrak.

1.2 Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi

1.2.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang peraturan bupati nomor 1 tahun 2017 yang membahas tentang Implementasi Sistem *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

1.2.2 Fokus

Adapun rencana fokus magang yang dimaksud penulis dari pengamatan ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Sistem *Open Data Contract* (ODC) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengimplementasian Sistem *Open Data Contract* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi hambatan yang ada ?

1.2.3 Lokasi

Kegiatan magang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dalam kegiatan magang ini adalah untuk mendapatkan suatu ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang pemerintahan pada umumnya dan pengimplementasian sistem *Open Data Contract* khususnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengimplementasian dari Sistem *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sistem *Open Data Contract*.

II. METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN

2.1 Desain

Dalam pengamatan magang ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap masalah serta bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Dimana hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau memberikan gambaran realita dari suatu kejadian yang diamati sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data terbagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang diperoleh dari sumbernya atau informan secara langsung. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh bukan melalui sumbernya langsung, melainkan dari sumber kedua bisa berupa orang lain ataupun data-data berupa dokumen atau berita. Pada kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terarah oleh peneliti (pewawancara) dengan beberapa orang sebagai informan atau yang diwawancarai untuk memperoleh sejumlah informasi atau data.

2) Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penulisan dari pengamatan terhadap subyek ataupun objek penulisan sehingga dapat diperoleh data atau informasi mengenai keterangan yang akan diamati.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mencari suatu objek yang dapat memberikan informasi mengenai suatu hal, dapat berupa dokumen (berkas) atau foto.

2.3 Teknik Analisis

Penulis dalam melaksanakan magang riset akan menggunakan Teknik Analisis Interaktif Miles & Huberman agar mendapatkan hasil yang dengan gambaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut, Dalam Sugiono (2012:334)” Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif di peroleh dari data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*”.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang telah di reduksi sebelumnya.

Tujuan dari penyajian data adalah untuk membantu pengamat dalam membuat kesimpulan yang tepat dan pemahaman secara total atas seluruh data yang terkumpul.

3. Conclusion Drawing/*verification*(verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel/menyakinkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Fokus Magang Riset Terapan Pemerintahan

3.1.1 Komunikasi dalam pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan dokumen kontrak dirasa sudah baik namun belum maksimal dengan dibuktikan adanya masyarakat yang belum mengetahui atau paham sepenuhnya tentang adanya keterbukaan dokumen kontrak yang dapat diakses online lewat internet. Selain itu juga koordinasi yang kurang maksimal sejak pergantian pimpinan yang membuat tata kelola berupa evaluasi belum berjalan menjadi bukti bahwa kurang maksimalnya koordinasi internal maupun eksternal yang dilakukan

3.2.2 Sumber Daya dalam Pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Sumber daya dalam pelaksanaan *Open Data Contract* ini juga sudah bagus namun di beberapa bagian juga belum maksimal. Hal ini di buktikan dengan kurangnya kualitas operator petugas IT bagian penginputan di luar Dinas Kominfo dan juga kuantitas pegawai yang bekerja di Dinas Kominfo dengan beban pekerjaan pengoprasian aplikasi yang cukup lumayan banyak. Di sisi lain seperti sarana prasarana untuk Dinas Kominfo sendiri sebagai pusat pengoprasian teknologi di Kabupaten Bojonegoro dirasa sudah sangat baik dengan sudah dipasangnya jaringan Fiber Optik untuk penguatan daya pancar internet.

3.2.3 Disposisi dalam pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ini dirasakan sudah sangat baik, karena para pegawai sendiri mempunyai komitmen untuk menjadikan kabupaten mereka lebih baik dengan menjadi lebih transparan dalam hal pemerintahan dan juga mereka mempunyai beban tanggung jawab pekerjaan sendiri yang harus di selesaikan.

3.2.4 Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Sistem *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Struktur Birokrasi dibagi menjadi 2 yaitu SOP dan juga Fragmentasi untuk untuk SOP dari pelaksanaan ODC sendiri sudah bagus karena sudah memiliki buku panduan petunjuk pengorpasian sedangkan untuk fragmentasi sendiri juga sudah cukup bagus karena pada dasarnya pelaksanaan dari sistem ini melibatkan seluruh OPD yang ada di Bojonegoro.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong

3.2.1 Faktor Penghambat

faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentang keterbukaan dokumen kontrak ini adalah dalam aspek komunikasi yang terjalin. Jadi komunikasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan dokumen kontrak ini dirasakan kurang hal itu di buktikan dengan masih ditemukannya masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya kebijakan dalam hal pembukaan dokumen kontrak ini. Hal ini berarti sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kurang untuk di terima oleh masyarakat sehingga

mereka tidak tahu. Selanjutnya koordinasi antara pemerintah disini dinas komunikasi dan informatika sebagai pelaksana dengan bupati terpilih yang baru dilantik. Karena dirasa ataupun tidak bahwa program ini seakan terhenti walaupun untuk aturan sendiri belum dicabut.

Selanjutnya tentang faktor sumber daya yang ada baik kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir adalah tentang konektivitas yang lama sehingga mengganggu dalam proses penginputan.

3.2.2 Faktor pendorong

Faktor pendorong dalam pelaksanaan keterbukaan dokumen kontrak ini adalah tentang komitmen dari para pegawai sendiri dan juga rasa tanggung jawab dari para pegawai yang telah di berikan amanah oleh bupati sehingga dalam hal disposisi dirasa sudah bagus antara pemerintah daerah lainnya. Faktor pendorong lainnya adalah tentang Standar Operasional Prosedur yang telah di buat dan di tujukan untuk operator dalam proses inputing data sehingga memudahkan operator dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya untuk fragmentasi tugas atau pembagian tugas juga dirasa sudah cukup baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya satu OPD saja yang bergerak namun seluruh OPD dan juga kecamatan yang ada di Bojonegoro juga ikut melakukan yang namanya inputing data yang nantinya akan dibuka ke publik

dan selanjutnya bisa di trace oleh masyarakat. Karena sesungguhnya dalam prosesnya sistem ini melibatkan seluruh pihak untuk berkolaborasi.

3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah

3.3.1 Meningkatkan Komunikasi dan Sosialisasi Kepada operator ODC dan Masyarakat

upaya menanggulangi hambatan yang ada antara lain adalah:

- a) Memberikan Pemahaman teknis dan tata cara yang benar kepada operator ataupun admin pada setiap OPD dalam hal ini merupakan pelaksana teknis penginputan data, sehingga meminimalisir adanya kecurangan saat meng-*input* data melalui *e-reporting* pada *website* resmi *Bojonegoro Open Sistem*.
- b) Penyebarluasan informasi oleh Kepala Dinas secara langsung saat kunjungan ke kecamatan atau desa-desa tentang adanya Sistem *Open Data Contract*.
- c) Pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh OPD terkait bahwa telah ada aplikasi yang penting yang membuka dokumen kontrak dari OPD yang bersangkutan untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- d) Penyebarluasan informasi melalui Media Sosial seperti halnya *facebook, instagram*, dan lain-lain sehingga para Generasi muda juga tahu dan mengerti tentang sistem ini

- e) Penyebarluasan informasi melalui radio dan televisi lokal.
- f) Melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan untuk menguatkan komitmen dalam pelaksanaan *Open Data Contract* yang *Interoperability*.
- g) Melakukan rapat minimal seminggu sekali dalam rangka evaluasi dan koordinasi.

3.3.2 Meningkatkan Serta Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Agar Lebih Efektif

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dari Sistem *Open Data Contract* dalam aspek Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro berupaya untuk meningkatkan kinerja dari hambatan-hambatan yang ada yaitu:

1. Masalah tentang keterbatasan sumber daya Manusia yang ada di bidang layanan E-Government adalah berupaya untuk menambah jumlah personil di beberapa bidang yang dirasakan masih kurang untuk dipenuhi dan dimaksimalkan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi Informasi dalam koordinasi dan komunikasi contohnya penggunaan jaringan intranet dalam melakukan pengiriman file data apapun agar lebih cepat dan efisien dan aman.
2. Masalah terbatasnya SDM yang paham tentang IT terkait dengan penerapan *Open Data Contract* di setiap OPD yang ada di Bojonegoro adalah dengan memberikan Buku petunjuk

penggunaandan juga sosialisasi kepada admin/operator OPD di luar Dinas Kominfo.

3. Masalah koneksi internet yang tidak stabil pada beberapa OPD mengakibatkan penerapan aplikasi terkendala, sementara aplikasi ODC sendiri harus dijalankan secara online. Mengatasi hambatan ini OPD harus mandiri. Meskipun pada Dinas Kominfo sendiri sebenarnya sudah memiliki jaringan Fiber Optik untuk menguatkan daya pancar signal jaringan internet. Selanjutnya menyampaikan saran kepada Bidang TIK yang menangani infrastruktur IT, agar ada staff yang akan selalu menangani titik jaringan internet yang bermasalah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang tentang Implementasi *Sistem Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil magang dan fakta setelah melaksanakan magang sudah berjalan cukup baik akan tetapi masih belum maksimal dan itu dibuktikan dengan belum tercapainya tujuan dari ODC sendiri yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif dan inovatif.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *Open Data Contract* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a) Komunikasi yang terjalin di internal pemerintah daerah dalam rangka koordinasi masih belum dilakukan, maupun komunikasi eksternal yang dilakukan pemerintah masih belum mencapai target sasaran. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat masih belum mencakup semua lapisan.
- b) Masih adanya sebagian masyarakat yang enggan berpartisipasi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi serta jaringan internet.
- c) Terbatasnya jumlah pegawai sesuai yang dibutuhkan dalam pengolahan data yang ada di Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro.
- d) Terbatasnya pegawai yang paham tentang IT di kecamatan-kecamatan dan OPD sebagai pelaksana penginputan data.
- e) Jaringan internet yang tidak stabil dan beratnya koneksi aplikasi untuk dijalankan.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan *Sistem Open Data Contract*), yaitu :

- h) Memberikan Pemahaman teknis kepada operator ataupun admin pada setiap OPD terutama tentang penginputan data, Untuk

meminimalisir adanya kecurangan saat meng-*input* data melalui e-*reporting* pada *website* resmi *Bojonegoro Open Sistem*.

- i) Untuk mengatasi masalah profesionalisme aparatur atau pelaksana teknis sistem serta operator sistem, akan diadakannya Pelatihan lebih lanjut dan khusus terhadap aparat pelaksana teknis sistem serta operator sistem dengan bekerja sama dengan Dinas-dinas lain maupun unsur elemen.
- j) Melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan untuk menguatkan komitmen dalam pelaksanaan *Open Data Contract* yang *Interoperability*.
- k) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satgas gugus kendali mutu serta memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam koordinasi dan komunikasi
- l) Untuk Mengatasi masalah ketidakmampuan pengetahuan sebagian masyarakat akan teknologi informasi dan jaringan internet dengan memberikan sosialisasi melalui poster-poster maupun banner yang di tempel pada kantor-kantor desa maupun kecamatan tentang Sistem *Open Data Contract* serta disosialisasikan lebih lanjut di media social agar para generasi muda dapat juga berpartisipasi dalam system ini.
- m) Menambah jumlah personil di beberapa bidang yang dirasakan masih kurang untuk dipenuhi dan dimaksimalkan.

Untuk mengatasi masalah Jaringan Internet yang ada pada OPD maka OPD yang ada sebaiknya untuk berlangganan bandwidth secara mandiri walaupun di Dinas kominfo sendiri sebenarnya telah memasang fiber optic untuk menguatkan daya pancar signal jaringan internet. Selain itu juga melaksanakan koordinasi kepada Bidang TIK yang menangani infrastruktur IT, agar ada staf yang akan selalu menangani titik jaringan internet yang bermasalah.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta

Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

H. S, Salim. 2004 .*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika

Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah*. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bandung.

Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*.

Jakarta: Kencana

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) bagian kedua. Bandung: Mandar Maju

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Sosial (Kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta

Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Public Dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi
Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Keterbukaan Dokumen Kontrak (Open Data Contract)